

# Trik Lama di Era Baru: Swasensor dalam Jurnalisme Indonesia

Ross Tapsell

## Abstrak

Meskipun Indonesia telah memasuki era demokrasi dan kebebasan pers, self-censorship tetap eksis di praktik profesional di banyak jurnalis koran Indonesia. Indonesia memiliki sejarah sensor yang panjang, terutama terkait tekanan dari Pemerintah yang mendorong jurnalis untuk melakukan swasensor terhadap karya mereka. Swasensor memang telah didorong dan dipromosikan melalui nilai-nilai yang diinternalisir dan diinstitutionalisasi di banyak publikasi koran Indonesia. Melalui wawancara dengan para jurnalis yang bekerja untuk koran baru dan koran yang dihidupkan kembali di Indonesia, artikel ini akan menjelaskan bagaimana praktik ini bisa berkembang dan bertahan hingga saat ini. Bila di rezim Orde Baru, agen utama dalam tekanan ini adalah Pemerintah, saat ini pemilik Koran menjadi figur kuat yang memaksakan kehendak dan membatasi otonomi jurnalis Indonesia.

---

*Even though Indonesia has entered a new era of democracy and press freedom, self-censorship still exists in the professional practice of many Indonesian newspaper journalists. Indonesia has a long history of censorship, particularly pressure from the government encouraging journalists to self-censor their work. As such, self-censorship has been encouraged and promoted through the institutionalised and internalised values of many Indonesian newspaper publications. Through interviews with journalists who work for new and re-established newspapers in Indonesia, this article will explain how the practice has evolved, and how it persists today. While the main agent of pressure during Indonesia's New Order regime was the government, today the owners of newspapers are powerful figures who exert their influence and hinder the autonomy of Indonesian journalists.*

## Kata Kunci/Keywords

Indonesia, kebebasan pers, kepemilikan media, koran, demokrasi, jurnalisme, sensor, pemerintah Orde Baru.

*Indonesia, press freedom, media ownership, newspapers, democracy, journalism, censorship, New Order government.*

*Staf pengajar di Australian National University.  
Ia bisa dihubungi di [ross.tapsell@anu.edu.au](mailto:ross.tapsell@anu.edu.au)*

## Pengantar

Pemberlakuan fungsi demokrasi di Indonesia berarti bahwa media cetak telah berkontribusi pada struktur media yang lebih hidup dan beragam, terlihat dari artikel kritik terhadap pemerintah dan institusi negara yang kian sering terlihat (Kitley, 2008, h.221). Lebih lanjut, dalam lima tahun terakhir, sejumlah harian cetak berdiri di Indonesia dan beberapa lainnya berhasil selamat dari kepunahan karena dibeli dan direstrukturisasi oleh pemilik yang bersemangat untuk menginvestasikan uang dalam jumlah besar di industri media cetak. Setidaknya di permukaan, ada beberapa tanda positif untuk jurnalis koran Indonesia, yang memiliki

publikasi baru

Penelitian lebih lanjut terhadap industri koran di Indonesia mengindikasikan adanya sesuatu yang lebih rumit dibandingkan pers yang bebas dan kritis yang dilakukan oleh para jurnalis dengan otonomi signifikan untuk menulis secara terbuka dalam berbagai topik. Artikel ini akan membahas beberapa koran yang dimiliki oleh pengusaha dan politikus terkemuka di Indonesia, yaitu Grup *Jawa Pos*, *Surabaya Post*, *Media Indonesia*, *The Jakarta Globe* dan *Jurnal Indonesia*. Para pemilik dari penerbitan ini telah mengembangkan media portfolio mereka dalam lima tahun terakhir. Artikel ini mendukung penemuan Richard Robison dan Vedi Hadiz (2004), yang mempertanyakan apakah pasar dan perubahan demokratis benar-benar mewakili transisi politik dan sosial yang lebih dalam dibandingkan rezim otoriter yang dipimpin oleh Soeharto. Publikasi media telah menjadi titik krusial dalam proliferasi politik uang. Di tahun 2010, mantan Pemimpin Redaksi *Tempo* dan anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Bambang Harymurti menyatakan adanya peningkatan “kartelisasi dalam kepemilikan media di Indonesia” (Harymurti, 2010, h. 17). Dalam setiap publikasi yang diteliti di artikel ini, isu kepemilikan menjadi faktor utama yang terjadi pada jurnalis yang bekerja untuk organisasi ini. Di saat koran yang dibeli atau didirikan oleh pengusaha dan politikus kaya bisa menyediakan berbagai pandangan yang berbeda di ruang publik Indonesia, otonomi jurnalis Indonesia seringkali dibatasi, mengingat swasensor terus menjadi bagian dalam praktik profesional mereka.

Swasensor seringkali dipelajari melalui lingkungan ruang redaksi, dibandingkan pelatihan resmi dari industri. Artikel ini menyatakan bahwa swasensor di Indonesia didorong oleh elite berkuasa, yang bertujuan untuk membatasi kritik terhadap tindakan-tindakan mereka. Sejak kejatuhan Orde Baru Soeharto di tahun 1998, mereka yang berusaha untuk mengontrol arus berita dengan mendorong praktik ini telah bergeser dari Pemerintah dan militer menjadi kelompok oligarki pemilik media dengan kepentingan politik dan bisnis. Meski para pemilik media ini memiliki ambisi politik dan/atau ambisi bisnis dengan level yang berbeda, penelitian ini melibatkan testimoni yang krusial dari para jurnalis di koran-koran ini, yang menjelaskan bagaimana tekanan yang berhubungan dengan kepemilikan membatasi praktik profesional mereka.

### Swasensor sebagai praktik profesional di jurnalisme Indonesia

Penelitian secara mendalam terhadap detail swasensor dan warisan sejarah di Indonesia sangat penting untuk memahami jurnalisme Indonesia kontemporer. Dalam skala tertentu, semua jurnalis melakukan swasensor terhadap reportase mereka. Bagian krusial dalam praktik jurnalistik ialah untuk menyediakan beberapa detail dan menghilangkan yang lain. Ini bergantung pada batasan ruang, waktu, kejelasan, tuntutan editorial dan pandangan terhadap ketertarikan audiens atau pembaca. Jurnalis di Indonesia dan berbagai tempat lainnya di Asia telah diberitahukan oleh Pemerintah bahwa swasensor adalah fungsi “tanggung jawab” da-

lamban “membangun dan mengembangkan bangsa” (Soeharto, 1989; Romano, 2005, h. 4). Di tahun 1980an dan 1990an, pandangan ini berkembang menjadi “jurnalisme pembangunan”, sebuah konsep yang dibahas secara luas dan diterapkan di berbagai negara dunia ketiga, terutama di Asia Mahathir, 1985; Lee Kuan Yew, 1992; Romano, 1999; 2003) dan bahkan diakui sebagai salah satu praktik jurnalistik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP, 1998, h.86). Sejumlah jurnalis dan editor di Indonesia saat ini masih mempercayai bahwa “tanggung jawab” jurnalis yang bertanggung jawab” sebaiknya menyaring atau memperhalus reportase mengenai isu sensitif, contohnya isu kekerasan antar etnis atau antar agama yang lebih baik tidak dilaporkan (Steele, 2011, h. 96). Ini adalah hal yang terjadi dengan jurnalis dari salah satu koran harian terkemuka di Indonesia, Kompas. Pendiri Kompas, Jakob Oetama, meyakini bahwa pers “tidak bisa tajam, kita harus menimbang banyak hal, terutama mengenai agama dan ras. Ada isu sensitif di negeri ini. Saya selalu berpikir mengenai dampak (nya)” (Wawancara dengan Jakob Oetama, 17 Oktober, 2006).

Namun, Angela Romano telah menunjukkan bahwa jurnalisme pembangunan telah memiliki banyak makan, mengingat para jurnalis yang bersikap kritis terhadap pemerintah mengalami berbagai pembatasan atas nama nilai “kepentingan” yang sesuai dengan budaya (Romano, 1999, h. 183-191). Dalam survey di 2007 terhadap 385 jurnalis di Indonesia, Thomas Hanitzsch menemukan bahwa para responden mempercayai peran media seperti dalam model *Fourth Estate* – dimana jurnalis sebagai *watchdog* dan agen kritisisme – yang harus “menggambarkan realita sebagaimana adanya” (Hanitzsch, 2007, h.182). Untuk artikel ini, swasensor terjadi ketika jurnalis membatasi atau mengindahkan aspek dari sebuah berita karena mereka takut akan repercussion dari mereka yang memiliki kepentingan tertentu yang dikutip dalam reportase mereka. Sebagaimana yang kita lihat, swasensor biasanya terjadi ketika jurnalis mempercayai bahwa mereka harus tunduk kepada agenda pemilik dalam berita tertentu, dibandingkan melaporkan secara bebas dan komprehensif dalam segala topik.

Konglomerat perusahaan media, termasuk banyak pemilik koran, telah menjadi kekuasaan di Indonesia dan berbagai negara lain di Asia. Liberalisasi media dapat mengarah pada konsentrasi media, ketika koran-koran yang ada pada akhirnya menemukan jalan mereka ke pihak elite kaya dan sekutu ekonomi mereka. Di Malaysia, deregulasi industri media melalui kebijakan privatisasi oleh administrasi Mahathir di 1983 berujung pada koran arus utama yang pada akhirnya dimiliki oleh beberapa individu yang dekat dengan koalisi penguasa (Luan and Hoon, 2008). Di India, kebanyakan koran dimiliki oleh pengusaha baron, dan ada peningkatan *trend* bagi para pengusaha untuk terjun ke politik (Prasad, 2008). Di Filipina, yang notabene dikenal dengan sistem media paling bebas di Asia, pemilu nasional di tahun 2004 melihat bahwa salah satu kandidat presiden, dua kandidat wakil presiden, dan tak kurang dari 10 kandidat senat, yang memiliki latar belakang media atau industri hiburan (Seneviratne, 2008, h. 66). Di Korea Selatan, penelitian di tahun 2009 oleh Eun Suk

Sa dari Universitas Sydney menemukan bahwa 51 persen dari jurnalis yang diteliti menyatakan pemilik media sebagai faktor penentu utama yang paling mungkin mempengaruhi kebebasan pers. (Eun Suk Sa, 2009, h. 7).

Penelitian untuk artikel ini melibatkan lebih dari 80 wawancara dengan jurnalis di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan sepanjang 2009 dan 2010.<sup>1</sup>

Jurnalis dipilih melalui apakah mereka biasa dengan tema 'irama' politik atau bisnis. Semua wawancara dilakukan secara pribadi dengan penulis, di bawah instruksi dengan tema luas kebebasan pers dan penekanan pada praktik jurnalistik ditanyakan. Tidak ada jurnalis yang menolak diwawancara untuk penelitian ini, meski beberapa meminta untuk anonim. Mayoritas jurnalis Indonesia yang diwawancara melihat bahwa praktik swasensor membatasi otonomi mereka. Jurnalis melihat itu sebagai konsep yang dipaksakan oleh elite politik dan bisnis untuk meredam kritik terhadap kekuasaan mereka. Dengan kata lain, para jurnalis sendiri merasa bahwa otonomi mereka dibatasi oleh tekanan eksternal terhadap praktik profesional mereka. Imam Syafi'i, mantan editor *Jawa Pos* yang kini menjabat sebagai editor JTV, jaringan televisi di Surabaya yang dimiliki oleh Grup *Jawa Pos*, menyimpulkan apa yang menjadi predicament para jurnalis dan editor di Indonesia saat ini: "Terkadang kita kehilangan kemerdekaan dan kita berkompromi. Ini bisa menjadi masalah karena seringkali (mereka) adalah orang-orang kaya di kalangan elite birokrasi" (Wawancara dengan Imam Syafi'i, 19 Februari 2010). Mereka seringkali adalah figur politik yang bertujuan untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Robison dan Hadiz telah menyatakan bahwa situasi ini sebagian besar disebabkan oleh kelanjutan hubungan politik di Indonesia, yang didorong oleh uang dan intimidasi politik, yang bermula pada era Soeharto (Robison dan Hadiz, 2004, h. 256).

## Swasensor di era Orde Baru (1965-1998)

Saat Soeharto memperoleh kekuasaan di tahun 1965, Pemerintah hanya perlu waktu kurang dari empat tahun untuk mengeluarkan Undang-Undang Pers yang sangat membatasi media (Lee, 1971, h.120). ada masa yang relatif lebih terbuka di masa kekuasaan Soeharto, tetapi jurnalisme adalah salah satu sektor yang dikorporatisasi di masa Orde Baru (Romano, 2003, h. 86; Dhakidae, 1991). Dari 1966, serikat jurnalis (PWI) disingkirkan dan koran-koran 'kiri' dibredel. PWI menjadi melanggar hukum dalam pemberitaan kebijakan Pemerintah, dan beberapa anggotanya merasa berkompromi secara menyeluruh dan tidak bisa melaporkan secara adil dan bebas (Hill, 1994, h. 67-73; Romano, 2003, h. 86-102). Praktik swasensor seringkali didorong oleh penguasa. Pada 1984, Soeharto telah menyatakan pada para editor secara terbuka mengenai persoalan yang telah dipahami media: "Setiap berita, apapun sumbernya, harus disensor secara hati-hati sebelum dipublikasikan" (*The Jakarta Post*, 11 Desember 1984, h. 5).

Orde Baru adalah ahli dalam mengatur persediaan media cetak melalui Menteri Penerangan. Ia secara arbitrer dan terbuka membredel koran-koran jika mereka mempublikasikan artikel yang dinilai sensitif bagi Pemerintah. Salah satu kejadian terkenal di tahun 1994, saat majalah mingguan *Tempo*, dan publikasi arus utama lainnya, *Editor* dan *DeTIK*, dibredel dengan kontroversial (Steele, 2006). Menteri Penerangan pada saat itu, Harmoko, menuduh mereka "gagal dalam melaksanakan swasensor" (Komite Perlindungan Jurnalis, 1995, h. 18). Lebih dari tiga puluh kasus pembredelan temporer atau permanen terjadi di antara tahun 1965 dan 1994 (Heryanto, 2003, p. 41). Editor koran Indonesia mengetahui bahaya menulis dengan konotasi politik dan swasensor, mengkhawatirkan pembredelan<sup>2</sup>. Jakob Oetama adalah Pemimpin Redaksi di *Kompas* di saat Orde Baru. Ia menyatakan: "Kebijakan *Kompas* adalah untuk melaporkan sebanyak yang dimungkinkan, akan tetapi untuk bisa memberitakan, kami harus sangat bijak, atau berhati-hati, atau pengecut" (Wawancara dengan Jakob Oetama, 17 Oktober 2006).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jurnalis koran belajar untuk menulis "di antara garis". Koran menyelipkan "pesan tersembunyi" dengan bahasa yang memancing dan dikomunikasikan melalui teknik halus yang terstruktur (Steele, 2006, h. 234; Romano, 2003, h. 46-48). Di samping penyingkiran oleh Pemerintah dan kekerasan militer, budaya memberikan uang kepada jurnalis atas pemberitaan yang sesuai menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, warisan yang membutuhkan waktu untuk dihapuskan di masa pasca Orde Baru. Jurnalis rentan terhadap jenis tekanan ini karena "jurnalisme amplop" dalam beberapa kasus memungkinkan jurnalis untuk mendapatkan dua kali dari gaji mereka yang minim (Romano, 2003, h. 150-63).

Di saat pembredelan publikasi adalah teknik efektif untuk memaksakan kontrol, jurnalis individu juga didisiplinkan secara pribadi oleh kekuasaan. Jurnalis menerima panggilan telepon secara rutin dan instruksi dari Menteri Penerangan, militer dan Departemen Luar Negeri – menunjukkan indikasi

1 Penelitian untuk jurnal ini dilakukan antara bulan November 2009 dan Mei 2010. Secara total saya mewawancarai wartawan dari 16 surat kabar, termasuk: di Bali - *The Bali Post*, *Radar Bali*, *The Jakarta Post* (kantor Bali), di Lombok - *Lombok Pos*, di Yogyakarta - *Harian Yogy*, *Kedaulatan Rakyat*, di Surabaya - *Jawa Pos*, *Surabaya Post*, *Radar Surabaya*, di Jawa - *Kompas*, *Tempo*, *Bisnis Indonesia*, *The Jakarta Post*, *The Jakarta Globe*, *Jurnal Nasional*, *Media Indonesia* dan *Viva News!* (jaringan berita online). Wartawan dipilih berdasarkan apakah mereka bekerja di "irama" politik atau bisnis. Wawancara dilakukan secara langsung, baik dalam bahasa Inggris atau Indonesia, tergantung pada preferensi wartawan. Beberapa wartawan meminta agar nama mereka tidak dipublikasikan, tetapi setuju bahwa media mereka dapat direferensi dengan kutipan mereka. Jumlah dari wawancara dari penerbitan yang digunakan dalam artikel ini adalah: *Surabaya Post* (8 wawancara), *Jurnal Nasional* (5 wawancara), Grup *Jawa Pos* (17 wawancara), *The Jakarta Globe* (9 wawancara), *Media Indonesia* (4 wawancara). Wawancara pribadi dengan Jakob Oetama, Abdurrahman Wahid dan Louise Williams pada tahun 2006 juga digunakan di bagian awal artikel. Terima kasih saya ucapkan untuk Profesor Dedy Nur Hidayat, yang meninggal pada 9 November 2010, dan Profesor Rachma Ida, atas dukungan dan antusiasme serta sponsor mereka yang penting untuk penelitian ini.

pengawasan menyeluruh oleh Orde Baru. Di saat militer, secara khusus, memberikan perintah, Tim redaksi tidak punya pilihan selain untuk mematuhi. Tidak mematuhi dapat mengarah pada hukuman secara fisik dari militer atau polisi, atau hukuman penjara. Jadi, efektivitas rezim Soeharto dalam mengontrol pers terutama disebabkan oleh kemampuannya dalam menciptakan lingkungan yang menakutkan, dimana jurnalis secara terus-menerus takut untuk melaporkan apapun yang bisa dimaknai sebagai kritik terhadap elite yang berkuasa.<sup>2</sup> David Hill menyatakan, media massa telah menjadi area yang penting dalam melanggengkan dan mereproduksi kekuasaan Orde Baru (Hill, 1994, h. 34–60).

Hal ini dicapai dengan menciptakan lingkungan dimana “pers yang bertanggung jawab” tidak seharusnya menulis yang bertentangan dengan persatuan nasional, program pembangunan pemerintah, militer, perpecahan di wilayah luar kepulauan, kehidupan Presiden dan kepentingan bisnis keluarga Presiden, aktivitas bisnis pejabat senior, atau korupsi atau berita dengan politik sensitif secara keras (Rodgers, 1982, h. 9; Schwartz, 1994, h. 47; Romano, 2003, h. 164–65). Sebagai hasilnya, “topik tabu” seperti kehidupan Presiden Soeharto dan konflik ras atau agama (SARA)<sup>3</sup>, dilaporkan dengan kehati-hatian berlebihan di media nasional. Seperti Louise Williams, mantan koresponden Australia di Indonesia dan salah satu penulis *Losing Control: Press Freedom in Asia*, katakan: “Sensor di Indonesia adalah garis yang tak terlihat. Kamu tidak bisa melebihi-lebihkannya dengan mundur begitu jauh sehingga kamu kehilangan begitu banyak kebebasan, dan kamu tidak sungguh-sungguh memahami seberapa jauh kamu bisa bermain di antaranya (Wawancara dengan Louise Williams, 27 Juni 2006). Jadi, efektivitas kontrol didasari oleh kemampuan elite berkuasa untuk menciptakan iklim ketidakpastian di pers sehingga ia menghasilkan jurnalis yang begitu disiplin sehingga ia akan berhati-hati dalam topik apapun, bahkan yang sedikit kontroversial.

Jurnalis baru yang memasuki lingkungan penuh ketakutan di ruang redaksi. Mereka belajar dari rekan mereka yang lebih berpengalaman yang pernah mengalami ketidaksetujuan oleh rezim Orde Baru. Banyak jurnalis yang lebih muda dikritik oleh editor (atau bahkan kepala editor) saat mereka melaporkan topik sensitif secara terbuka. Kurniawan Mohammed bergabung dengan koran *Jawa Pos* di tahun 1991 sebagai jurnalis baru. Saat memberikan artikel, ia diberitahu oleh editornya bahwa berita tersebut tidak akan dipublikasikan dan ia harus berhenti menulis berita tentang kekerasan agama. Kurniawan mengatakan: “Saya kecewa dan tidak menyadari pada waktu itu, tapi editor saya mengatakan bahwa jenis berita ini dilarang karena (topik tabu) konflik

agama” (Wawancara dengan Kurniawan Mohammed, 17 Februari 2010). Selain itu, Achmad Jauhat memulai karir sebagai jurnalis *Bisnis Indonesia* di 1992. Ia mempelajari soal swasensor melalui kritik dari kepala editornya. Ia mengatakan: “Bos saya pernah mengatakan ‘Jangan tulis sesuatu yang akan membuat keluarga Soeharto marah’. Saya pernah menulis tentang proyek bisnis Tutut (putri Soeharto), dan bos saya sangat marah karenanya. Ada begitu banyak batasan yang kemudian membuat kami takut dan melakukan swasensor terhadap artikel” (Wawancara dengan Achmad Jauhat, 27 April 2010). Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana swasensor diajarkan. Dalam kasus ini, instruksi dan arahan diberikan oleh atasan di ruang redaksi atau jurnalis yang telah mengerti bahwa jika mereka ingin menyenangkan para pimpinan, dan ingin tulisannya dipublikasikan, mereka harus mengikuti praktik jurnalisme konvensional di masa Orde Baru dan swasensor hasil kerja mereka.

Dhimam Abror adalah mantan Pemimpin Redaksi *Jawa Pos* di masa Soeharto, dan ingat pemberitaan di masa itu: “Ia menciptakan aura swasensor dari jurnalis untuk tidak membuat masalah apapun. Swasensor adalah otomatis, kamu hanya merespon – kamu tidak boleh menulis tentang ini atau tentang itu, dan kamu tahu berita ini baik dan berita itu tidak” (Wawancara dengan Dhimam Abror, 28 Januari 2010). Hasilnya, model Fourth Estate yang non-politis dalam jurnalisme tidak pernah benar-benar tercapai di masa Soeharto (Hill and Sen, 2000, h. 52). Lebih lanjut, Daniel Dhakidae menyatakan bahwa jurnalisme Indonesia di bawah Orde Baru yang “dipenggal secara politik” karena konsentrasi kepemilikan baik oleh negara dan tekanan pasar di awal 1975 (Dhakidae, 1991, h. 283), dengan kepemilikan dua puluh media atau lebih yang terkonsentrasi di tangan beberapa elite penguasa yang mengontrol arus informasi. Grup konglomerat media membagi kepentingan bisnisnya ke industri lain Dhakidae, 1991, h. 324–86; Hill, 1994, h. 81–110), warisan yang, bisa kita lihat di bawah, terus berlanjut setelah kejatuhan Orde Baru (Heryanto, 2003, p. 45).

Walaupun ada begitu banyak tekanan, banyak jurnalis dan editor Indonesia yang berusaha untuk menentang peran otoriter Soeharto. Secara khusus, majalah *Tempo* dinilai “bebas” dari Pemerintah, seperti yang ditulis oleh Steele, “mungkin kebebasan ini yang paling mengganggu para musuh *Tempo* di masa Soeharto” (Steele, 2006, h. xiii). Kejatuhan Soeharto di tahun 1998 mengarah pada naiknya B. J. Habibie, yang tidak populer, untuk menjadi presiden. Di bawah tekanan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, Habibie menjanjikan reformasi yang mencakup kebebasan pers yang lebih besar, tapi ia hanya menjabat selama 17 bulan. Salah satu tugas yang dilakukan oleh penerus Habibie sebagai Presiden, Abdurrahman Wahid, adalah menghapus Departemen Penerangan (Barton, 2002, h. 290). Pernyataan Wahid mengenai keputusan ini:

“Di bawah Soeharto, departemen ini seperti polisi bagi kita. Selalu ketika saya menulis. Saya harus melakukan sejenis swasensor, atau tulisan saya tidak akan dimuat. Kamu harus berhati-hati. Soeharto mengontrol

2 46 publikasi lokal dilarang dan Asosiasi Jurnalis Indonesia disingkirkan selama periode Orde Baru. Penyingkiran paling ekstrem terjadi dengan pelarangan 12 publikasi pada tahun 1974, dan Kompas dan Sinar Harapan, dua surat kabar di Indonesia yang paling banyak dibaca, pada tahun 1978. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 1994, *Tempo*, Editor dan Detik dibredel.

3 SARA adalah singkatan dari hubungan atau konflik suku (etnis), agama (agama), ras (ras) dan antargolongan (“antara kelompok”).

masyarakat melalui itu" (Wawancara dengan Abdurrahman Wahid, 28 Oktober 2006).

Saat diwawancara di tahun 2006 apakah kebebasan pers adalah hal yang ia dambakan ketika menutup Departemen Penerangan, Wahid menjawab:

"Tidak. Saya tidak puas. Saat ini, ada hal yang lebih implisit daripada sensor. Swasensor adalah bukti. Warisan zaman Soeharto – sekarang warisan ini mengambil bentuk lain" (Wawancara dengan Abdurrahman Wahid, 28 Oktober 2006).

Meski ada perubahan demokrasi dan kebebasan kepada jurnalis, survei global yang dilaksanakan di 2010 menunjukkan gambaran pesimis akan kebebasan pers Indonesia. Freedom House menilai pers Indonesia sebagai "Separuh Bebas" dan menempatkan Indonesia di peringkat 108 dari 191 negara di dalam Peringkat Kebebasan Pers Dunia (Freedom House, 2011). Peringkat Kebebasan Pers dari Reporters Without Borders' menempatkan Indonesia di nomor 146 dari 178 negara yang disurvei (Reporters Without Borders, 2011). Survei ini menunjukkan bahwa kebebasan pers tidak mudah diperoleh di Indonesia. Harry Bhaskara, editor harian berbahasa-Inggris, *The Jakarta Post*, mencatat bahwa kebanyakan jurnalis berasumsi dengan kejatuhan Soeharto, memperoleh kebebasan pers adalah hal mudah: "Saat Orde Baru berakhir, kami mengira bahwa tekanan akan berhenti. Tapi tetap ada tekanan terhadap kebebasan jurnalis" (Wawancara dengan Harry Bhaskara, 3 Maret 2010). Di Indonesia, saat ini banyak jurnalis muda yang masih ditekan untuk memahami pentingnya swasensor untuk membatasi kritik terhadap elite penguasa. Tapi tanpa pengawasan hierarkis dari Negara dan tekanan koersif dari pemerintah otoriter dan militer, bagaimana dan mengapa, jurnalis masih diajarkan praktik ini?

### Era baru dan industri publikasi koran sekarang

Demokrasi di "era baru" (1998-sekarang) telah melihat pers menjadi jauh lebih bebas dari kontrol pemerintah dibandingkan masa Orde Baru (Kakialatu, 2007; Steele, 2006)<sup>4</sup>. Meskipun saya tidak mewawancarai wartawan di bagian terluar Indonesia, seperti Papua atau Aceh, di mana militer mengambil peran yang lebih aktif dalam politik dan jurnalisisme (Kitley, 2008b; Fitzpatrick, 2006; Mellish, 2006; Hill, 2011), setidaknya, ada ketakutan di kalangan jurnalis di Indonesia bahwa pemerintah dapat melarang penerbitan pers, seperti yang terjadi begitu sering dan dengan impunitas, di masa lalu. Meski jurnalis di

Indonesia saat ini masih menghadapi ancaman dan kekerasan fisik (Steele, 2011, hal 97.), jumlah insiden tersebut telah menurun sejak jatuhnya Orde Baru.<sup>5</sup>

Purnomo, seorang jurnalis veteran di *Surabaya Post* selama 25 tahun, menyuarakan pernyataan yang banyak dirasakan oleh jurnalis lain dalam penelitian ini:

"Dalam banyak hal, pers jauh lebih bebas. Sekarang kita dapat menulis tentang TNI [militer Indonesia], kita bisa menulis tentang hak asasi manusia, dan kita tidak takut bahwa kita akan diculik atau dipukuli. Jauh lebih aman untuk menjadi jurnalis sekarang dan kami jauh lebih takut pada masa Orde Baru. Tapi kami wartawan tidak 100% aman. Masih ada beberapa aturan. Selalu ada seseorang mengendalikan kita -sekarang mereka adalah *gatekeepers*" (Wawancara dengan Purnomo, 26 Februari 2010).

"*Gatekeepers*" yang dimaksud oleh Purnomo mengacu pada mereka yang menekan wartawan untuk swasensor. Mereka adalah editor yang takut pada dampak dari pemiliknya, mereka adalah manajer yang ditunjuk secara eksplisit untuk mengontrol aliran berita, mereka adalah raja media yang ingin mempromosikan kepentingan politik atau bisnis di koran. Dalam buku mereka *Reorganising Power in Indonesia*, Robison dan Hadiz berpendapat bahwa pembongkaran rezim otoriter Soeharto tidak menghasilkan "proses perubahan yang cepat dan tanpa friksi menuju pemerintahan yang liberal" (Robison dan Hadiz, 2004, hal. 223). Dengan demikian, meski pemerintah otoriter tidak lagi mengontrol kekuasaan atau menetapkan agenda, dalam demokrasi "era baru" di Indonesia, "reorganisasi hubungan kekuasaan dari predator tua ke dalam sistem baru" oleh mereka yang memiliki "kepentingan dalam mempertahankan sistem kekuasaan yang sewenang-wenang" (Robison dan Hadiz, 2004, hlm 223-24) lah yang masih memberikan hambatan bagi pemberitaan yang lebih liberal sebagai cara memaksimalkan keuntungan komersial dari jurnalisisme.

Robison dan Hadiz berpendapat bahwa kepentingan pengusaha bisnis, termasuk mogul media, yang dipelihara selama rezim Soeharto, telah diakomodasi dalam "aliansi oligarki baru" dan koalisi politik (Robison dan Hadiz, 2004, hal. 224). Saat ini, sembilan kelompok bisnis mengendalikan setengah media cetak di Indonesia (Haryanto, 2011, h.104). Dengan demikian, lanskap produksi surat kabar di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa para pemilik adalah pemain politik dan ekonomi yang dominan. Surat kabar terlaris di Indonesia adalah *Kompas* dan *Jawa Pos*, sementara publikasi berpengaruh lainnya termasuk *Tempo*, *Pos Kota* dan koran berbahasa Inggris, *The Jakarta Post*<sup>6</sup>.

Seperti dijelaskan di atas, surat kabar yang dipi-

4 Namun, ancaman terhadap kebebasan pers terus terjadi termasuk tuntutan hukum terhadap pers yang dibawa oleh orang-orang berpengaruh, yang dapat mempengaruhi hakim dan aparat penegak hukum.

5 Insiden baru-baru ini yang melibatkan kematian yang banyak diliput, yaitu kematian wartawan *Radar Bali*, AA Prabangsa, yang diculik dan disiksa di Bali pada tahun 2008. Pembunuhnya dan pengusaha yang memerintahkan kematiannya, ditemukan bersalah dalam pengadilan pidana Bali pada tahun 2010. Kasus ini mendapat liputan media yang intens dan mengakibatkan kecaman publik pada pembunuh.

6 Statistik dari Nielsen Media Research [dikutip dalam Jawa Pos: 'Newspaper for Everyone', Grup *Jawa Pos*, 2010] 'Consumer Insights' pada tahun 2009 untuk pembaca di atas usia 10 tahun, di sembilan kota terbesar di Indonesia. Hasilnya menempatkan *Jawa Pos* dan *Kompas* pada posisi yang hampir sama di peringkat atas, dengan masing-masing jumlah pembaca sekitar 1,4 juta pembaca. *Pos Kota* ditempatkan pada posisi ketiga, dengan jumlah pembaca yang tak jauh beda, yaitu 1,1 juta.

lih untuk analisis di sini adalah yang dimiliki oleh politisi terkemuka Indonesia atau taipan. Setiap pemilik memiliki tingkat yang berbeda dalam pengaruh politik dan kekayaan finansial, dan persamaan dan perbedaan akan dijelaskan di bawah ini. Namun, sepiantas melihat pola kepemilikan pers di Indonesia akan menunjukkan bahwa ada kenaikan dalam bentuk kepemilikan surat kabar. Semua pemilik yang diteliti di bawah ini telah memperluas portofolio media mereka dalam lima tahun terakhir, biasanya dengan membentuk surat kabar baru, atau membeli yang sudah ada. Penelitian selanjutnya bisa menyelidiki sejauh mana struktur kepemilikan di koran yang tidak dimiliki oleh taipan atau politisi, mempengaruhi praktek jurnalistik profesional di Indonesia. Berikut ini adalah sketsa latar belakang pemilik yang penerbitannya dibahas dalam artikel ini.

Aburizal Bakrie adalah seorang konglomerat kaya dan tokoh politik yang kuat. Dia saat ini menjabat sebagai Ketua partai politik Golkar<sup>7</sup> dan, menurut majalah Forbes, salah satu orang terkaya Indonesia, dengan nilai US\$890 juta (Forbes, Desember 2011, h.48). Bakrie mengontrol perusahaan yang menjangkau luasnya perekonomian Indonesia. Mereka termasuk pertambangan, minyak dan gas, kelapa sawit, properti, telekomunikasi dan keuangan. Portofolio Bakrie Media meliputi saham di stasiun televisi ANTV, TV ONE, dan ArekTV (Surabaya) dan layanan jaringan berita online baru, VIVAnews! Pada tahun 2008, Bakrie sedang memperjuangkan citra publik atas keterlibatan perusahaannya dalam semburan lumpur di pinggir Surabaya yang menimpa lebih dari 40.000 orang (Schiller *et al.*, 2008). Perusahaan Lapindo Brantas, mencoba untuk mengekspresikan pandangannya di media bahwa semburan lumpur itu mulai karena "penyebab alami" dan bukan karena adanya pengeboran gas di daerah (McMichael, 2009). Ia menyewa sebuah perusahaan hubungan masyarakat untuk menaruh lebih banyak informasi dari Grup Bakrie termasuk dalam laporan surat kabar. Ini sebagian besar tidak berhasil (Tapsell, 2010). Pada bulan November 2008, *Tempo* memuat berita halaman depan berjudul 'Siapa Peduli Bakrie?' Ketika bisnis keluarga Bakrie hampir runtuh (*Tempo*, 17 November 2008). Koran di Surabaya yang sangat kritis terhadap Bakrie, dan di bawah ini tekanan publik yang cukup, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dua kali memerintahkan Lapindo untuk mengkompensasi mereka yang telah mengungsi akibat semburan lumpur. Dalam konteks ini bahwa Bakrie membeli Surabaya Post, sebuah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang didirikan pada tahun 1953, tetapi pada tahun 2008 koran tersebut di ambang tutup karena pendapatannya tidak mencukupi dalam pasar yang didominasi oleh Jawa Pos.

Kampanye Bakrie mewakili Golkar untuk Pemilu Presiden di tahun 2009 melawan saingan raja media, Surya Paloh menunjukkan bagaimana saluran media Paloh dan mengusung kepentingan masing-masing pemilik dengan berani (Lutfia dan Prameshwari,

2009). Pada akhir 2011, Bakrie menjadi calon dari Partai Golkar untuk Pemilu Presiden 2014 ('I'm Ready For 2014: Bakrie', *The Jakarta Globe*, 19 Februari 2012).

Taipan kaya lainnya adalah James Riady, pemilik dan Wakil Ketua Grup Lippo. Lippo adalah pemilik dan pengembang properti terbesar di Indonesia, serta memiliki kepentingan bisnis di bidang perbankan, penerbitan dan ritel. Riady juga meningkatkan portofolio medianya dalam lima tahun terakhir. Dia memiliki *Bisnis Indonesia*, *The Globe*, *Investor Daily*, dan mengembangkan sebuah portal web dan saluran berita televisi kabel. Pada tahun 2006, Riady membeli surat kabar berbahasa Indonesia, *Suara Pembaruan*, dan pada tahun 2008 ia mendirikan *The Jakarta Globe* sebagai harian berbahasa Inggris yang mewah untuk menyaingi *The Jakarta Post*. Sebagai etnis cina yang beragama Kristen, Riady cenderung tak mungkin untuk mencalonkan diri di parlemen, tetapi ia telah mempertahankan hubungan dekat dengan politisi di Indonesia dan Amerika Serikat (*The New York Times*, 20 Maret 2001). Putra Riady, John, adalah Direktur Media Digital di *The Jakarta Globe*.

Para pemilik koran termasuk politisi terkemuka, yaitu Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tahun 2006, SBY mendirikan *Jurnal Nasional*, sebuah surat kabar harian yang terbit di Jakarta. SBY menunjuk juru bicara yang sekarang menjabat Menteri Olahraga, Andy Mallarangeng, sebagai salah satu administrator, dan mempekerjakan mantan jurnalis Ramadhan Pohan sebagai Pemimpin Redaksi pertama koran tersebut. Menurut Pohan, *Jurnal Nasional* didirikan "sehingga ada koran yang seharusnya tidak hanya melaporkan berita buruk - tapi juga kabar baik. Dalam *Jurnal Nasional* kita harus menyoroti pemikiran Presiden untuk membuat masyarakat lebih mudah memahami ide di balik kebijakan" (Wawancara dengan Ramadhan Pohan, 14 April 2010). Penunjukkan Pohan sebagai Anggota Parlemen dalam kabinet SBY di tahun 2008 adalah bukti lebih lanjut bagi yang skeptis dan melihat *Jurnal Nasional* sebagai "koran partai SBY".

Pada akhir 2011, situs berita media online terbesar di Indonesia, *Detik.com*, dibeli seharga \$ US70 juta oleh Chairul Tanjung (Forbes, 2011, h. 43), pemilik stasiun televisi Trans7 dan TransTV, yang diketahui sebagai rekan dekat SBY ('Media Tycoons on Strong Footing as Businesses Thrive', *The Jakarta Post*, 11 Desember 2011).

Tokoh politik terkenal lainnya yang telah berinvestasi di industri media adakah Surya Paloh. Surya memiliki *Media Indonesia*, surat kabar harian berbahasa-Indonesia berbasis di Jakarta, serta *Lampung Post*. Portofolio medianya telah diperluas melalui pembentukan stasiun televisi MetroTV, yang ia didirikan pada 2001<sup>8</sup>. Surya memiliki ambisi untuk menjadi Presiden Indonesia, dan setelah kehilangan kepemimpinan di Golkar dari saingan medianya, Aburizal Bakrie pada tahun 2008, ia mendirikan sendiri partai politik, Partai Nasional Demokrat. Surya menerima dorongan besar pada akhir 2011 ketika "ikan besar" dari industri televisi Indonesia

7 Partai Golkar adalah partai yang berkuasa selama Rezim Soeharto (1965-1998) dan merupakan bagian dari koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah berjalan.

8 Surya Paloh mulai di media cetak pada tahun 1985 ketika ia mendirikan PT Surya Persindo dan koran harian Prioritas yang telah ditutup.

dan seorang pria senilai \$ 1,19 juta (*Forbes*, 2011, h. 47), Hary Tanoesoedibjo, bergabung dengan partainya (Media Tycoons on Strong Footing as Business Thrive', *The Jakarta Post*, 11 Desember 2011).

Konglomerat terbesar di media Indonesia adalah Grup *Jawa Pos*. CEO nya adalah Dahlan Iskan, seorang mantan wartawan *Tempo* yang ditugaskan di surat kabar harian berbasis Surabaya yang tengah berjuang, *Jawa Pos* pada tahun 1982. Dia membangun sirkulasi koran yang pada saat itu 6.000, naik menjadi lebih dari 300.000 pada tahun 2000. Grup *Jawa Pos* dimasukkan dalam artikel ini karena dua alasan. Pertama, ini adalah investasi konglomerat dalam surat kabar baru yang paling berkembang pesat di Indonesia. Grup *Jawa Pos* telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir dan sekarang memiliki 140 surat kabar berbahasa Indonesia yang dicetak di seluruh Indonesia.<sup>9</sup> Pada tahun 2002, Grup *Jawa Pos* mulai berinvestasi di televisi. Pada tahun 2009, ia memiliki 15 stasiun televisi lokal (Rachma Ida, 2011, hal. 19). Kedua, bisnis dan kepentingan politik Dahlan Iskan juga berkembang pesat. Grup *Jawa Pos* saat ini berinvestasi di bidang-bidang non-media seperti hotel, agen perjalanan, perumahan dan transportasi. Pada tahun 2003, Dahlan memasuki industri listrik, membeli pembangkit listrik di bagian luar Surabaya dan Kalimantan Timur. Pada akhir 2009, Dahlan diangkat Kepala perusahaan yang mengatur penggunaan listrik di Indonesia, PLN [Perusahaan Listrik Negara] oleh Presiden SBY, di tengah saran bahwa Grup *Jawa Pos* bersikap pro-SBY dalam pemberitaan Pemilu Presiden 2009. Putra Dahlan, Azrul Ananda, adalah Pemimpin Redaksi *Jawa Pos* 2005-2007, dan kemudian menjadi Pemimpin Redaksi, posisi yang dia pegang hingga hari ini. Azrul membela keputusan perusahaannya untuk menempatkan SBY di sampul depan lebih sering daripada politisi yang lain dengan mengatakan: "Ketika kita menempatkan SBY pada sampul depan, itu menjual. Ketika kita menempatkan [kandidat lain seperti] Megawati Soekarnoputri, tidak menjual. Itu sesederhana itu. [Beberapa] orang mengeluh, tapi kami hanya memberikan apa yang diinginkan orang-orang" (Wawancara dengan Azrul, 2010). Pada Oktober 2011, Dahlan Iskan dipromosikan oleh SBY untuk posisi Menteri Badan Usaha Dalam Negeri (BUMN).

Penting untuk ditekankan bahwa setiap pemilik yang dijelaskan ini memiliki tingkat ambisi politik dan portofolio bisnis yang berbeda. Sementara rincian mengenai siapa yang memiliki surat kabar ini dapat dinyatakan dengan mudah, pengaruh pemilik media terhadap wartawan lebih sulit untuk ditentukan. Seperti yang ditulis Krishna Sen: "bukti empiris tentang bagaimana dan berapa banyak pemilik mengontrol berita dan analisisnya, sulit didapat di Indonesia dan dalam kebanyakan konteks lainnya (Sen, 2011, h.8). Pada tahun 2009, Hendrato Darudoyo melakukan survei terhadap 82 jurnalis di enam surat kabar utama. Ia menemukan bahwa 71 persen dari jurnalis mengklaim bahwa keputusan yang berkaitan dengan isi dapat berubah karena pengaruh pemilik, bahkan jika pemilik jarang menghadiri rapat editorial (Da-

rudoyo, 2009). Survei Hendrato adalah indikasi yang berguna tentang bagaimana jurnalis menyadari gangguan pemilik. Tapi bagaimana pemilik mempengaruhi jurnalis secara khusus jika mereka jarang menghadiri pertemuan editorial? Wawancara saya yang diperpanjang dengan wartawan surat kabar di Indonesia menunjukkan bahwa ada tekanan konsisten yang ditempatkan pada wartawan untuk terlibat dalam swasensor sebagai akibat dari kepemilikan. Sementara hanya wawancara terpilih yang dikutip dalam artikel ini, komentar mereka menunjukkan bukti dampak langsung dari mereka yang berkuasa pada produksi berita. Hal ini penting untuk mendengar dari para wartawan, dalam kata-kata mereka sendiri, tentang bagaimana mereka merasa praktek profesional mereka terhalang.

### Trik Lama

Metode yang digunakan untuk mendisiplinkan wartawan di Indonesia saat ini tidak berbeda dengan mereka yang bekerja di bawah rezim Soeharto. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana di dalam ruang redaksi dimana wartawan takut ditegur jika mereka menulis tentang topik tabu atau menjelekkan hierarki yang berkuasa. Jadi, swasensor didorong hingga menjadi bagian dari praktek jurnalistik. Tekanan yang paling eksplisit diterapkan ketika janji di dalam ruang redaksi dibuat untuk mendukung kepentingan pemilik. Sebagai contoh, ketika Presiden SBY menunjuk juru bicara Presiden, Andi Mallerangeng, sebagai Direktur perusahaan, banyak wartawan *Jurnal Nasional* mengeluh bahwa instruksi sering datang dari Mallerangeng untuk menggambarkan SBY dalam nuansa positif. Wartawan *Jurnal Nasional* juga mengklaim bahwa Pemimpin Redaksi, Ramadhan Pohan meminta mereka untuk tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin mempermalukan SBY pada konferensi pers, dan ketika wartawan melakukannya, mereka ditegur oleh Pohan dan Mallerangeng. Hal ini menyebabkan mereka "merasa terkurung" karena mereka merasa "tidak bisa menulis apapun" (Wawancara dengan Anonim 1, 15 Maret 2010). Dalam sebuah wawancara dengan penulis, Ramadhan Pohan menyatakan bahwa: "Ini tidak seperti SBY mengontrol koran. Dia tidak pernah mengatakan 'tidak menulis ini'. Ini bergantung dengan interpretasi saya. Para Pemimpin Redaksi harus menafsirkan kehendak SBY" (Wawancara dengan Ramadhan Pohan, 14 April 2010). "Interpretasi" ini kemudian disampaikan kepada editor tiap bidang dan sub-editor. Pohan teringat kasus di mana ia harus menegur wartawan dan editor ketika Presiden SBY melakukan perjalanan ke kota Bandung. Judul dan gambar yang menyertainya yang diterbitkan di *Jurnal Nasional* pada hari berikutnya adalah demonstrasi menentang SBY. Tapi Pohan mengatakan: "Jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan mereka yang mendukung SBY. Kita perlu menekankan perspektif yang baik, [dan] harmoni. Tanggung jawab saya adalah untuk berbicara dengan wartawan dan editor. Aku berkata 'ini tidak baik'. Aku harus meyakinkan wartawan dan editor saya tentang gaya ini" (Wawancara dengan Ramadhan Pohan, 14 April 2010).

Perjanjian manajerial yang kontroversial juga di-

9 Untuk daftar lengkap dari surat kabar Grup Jawa Pos, lihat [http://www.jpnn.com/jpnn\\_network.php](http://www.jpnn.com/jpnn_network.php).

buat ketika Aburizal Bakrie membeli *Surabaya Post* pada tahun 2008. Dua eksekutif dari Lapindo Brantas, perusahaan kontroversial yang terlibat dalam bencana semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, ditempatkan di posisi sebagai Direktur *Surabaya Post*. Hal ini menyebabkan tekanan dari manajemen tentang cara wartawan melaporkan semburan lumpur (Tapsell, 2010). Salah satu wartawan yang diwawancarai untuk penelitian ini, yang memilih untuk anonim, mengatakan: "(Ketika) Para eksekutif Lapindo membaca artikel yang mereka tidak suka, mereka akan menghubungi Pemimpin Redaksi dan protes. Pemimpin Redaksi kemudian akan berbicara dengan Redaktur Pelaksana, yang akan berbicara dengan editor lain, yang kemudian berbicara kepada wartawan tentang masalah dengan berita" (Wawancara dengan Anonim 2, 28 Januari 2010). Dengan demikian, instruksi untuk "tersaring turun" melalui struktur ruang redaksi dari pemilik kepada direksi dan manajer yang ditunjuk secara khusus.

Wartawan di *Surabaya Post* mengklaim bahwa ketika Bakrie menjadi pemilik surat kabar pada tahun 2008, suasana diciptakan dalam kaitannya dengan bagaimana jurnalis harus melaporkan kepentingan politik dan bisnis - khususnya, semburan lumpur. Satu wartawan mengatakan: "Kami tidak bisa melaporkan semburan lumpur dengan mudah. Tidak ada instruksi langsung dari keluarga Bakrie, namun suasana itu sendiri melemparkan kita ke swasensor. Tidak mudah bagi saya atau rekan-rekan saya untuk mengekspresikan pikiran kami" (Wawancara dengan Anonim 3, 28 Januari 2010). Dhimam Abror, yang saat itu menjabat Pemimpin Redaksi, menjelaskan bagaimana pengalamannya berurusan dengan agenda-setter selama periode Orde Baru memungkinkan dia untuk memahami bagaimana petunjuk direksi dan manajer Bakrie harus ditafsirkan:

Sudah diketahui secara luas bahwa Bakrie memiliki kepentingan bisnis dan politik. Pemilik tidak pernah memberitahu kita secara langsung, karena kita tahu garis batasnya. Untungnya, saya berpengalaman dalam hal ini. Warisan Orde Baru masih dalam benak saya. Tidak ada intervensi langsung, tentu saja, tetapi kita tahu bahwa lebih baik untuk menulis beberapa berita dengan sudut pandang yang berbeda, atau sudut yang berbeda (Wawancara dengan Dhimam Abror, 28 Januari 2010).

Sudut yang "berbeda" berarti banyak berita dari pers milik Bakrie yang tidak kritis terhadap keterlibatan Aburizal Bakrie dan Lapindo dalam semburan lumpur di Jawa Timur, dan laporan tentang korban bencana juga dihindari. Wartawan memahami petunjuk. Seperti yang dikatakan salah seorang wartawan: "Manajemen tingkat menengah menciptakan suasana swasensor dan cerita-cerita mengenai human interest tidak dinaikkan" (Wawancara dengan Anonim 4, 4 Februari 2010). Dengan demikian, praktek swasensor menjadi terinternalisasi dalam ruang redaksi.

Kadang-kadang instruksi diberikan terang-terangan dalam pertemuan editorial. Salah satu wartawan *Surabaya Post* menyatakan bahwa:

Memang benar bahwa kita telah diberitahu untuk tidak menulis hal-hal buruk tentang Lapindo dalam kaitannya dengan gunung lumpur. Budaya berubah sangat banyak karena kepemilikan berubah. Kami

biasa melaporkan dengan persis kondisi di lapangan, dan dampak semburan lumpur. Kami jarang menulis tentang hal itu sekarang. Lumpur masih terus keluar, tetapi bagi kami, sepertinya bumi melennanya (Wawancara dengan Anonim 5, 4 Februari 2010).

Bonny Triyana, wartawan yang mengundurkan diri dari *Jurnal Nasional* dan *Viva News* yang dimiliki Bakrie karena tekanan dari kepemilikan, mengingat bahwa dalam sebuah pertemuan editorial di Viva, editor menolak dengan terbuka untuk menaikkan sebuah berita tentang kepentingan keluarga Bakrie. Penjelasan yang diberikan adalah bahwa "itu tidak baik bagi kita - kita baru [sebagai penerbitan]" (Wawancara dengan Bonny Triyana, 25 Maret 2010). Editor merasa bahwa jika mereka mengkritik pemilik organisasi berita mereka, itu bisa mengarah pada konfrontasi yang tidak diinginkan dengan manajemen, dan sebagai media publikasi baru, ini berarti bersikap hati-hati.

Menurut Kardono Setyorakhmadi, wartawan politik di *Jawa Pos*, Surabaya, "Pemilik adalah hambatan terbesar bagi kebebasan pers di Indonesia. Petunjuk diberikan dari atas dan filter turun melalui kebijakan editorial" (Wawancara dengan Kardono Setyorakhmadi, 21 Februari 2010). Ia mencontohkan kasus di tahun 2006 ketika ia diperintahkan oleh Pemimpin Redaksi untuk "mundur" pada sebuah berita yang melibatkan pemilik: "Kami akhirnya menulis sekitar 20 persen dari berita itu. Dalam kasus ini, Pemimpin Redaksi [anak Dahlan, Azrul Ananda] terbuka tentang alasannya. Dia memiliki gaya yang lugas. Dia mengatakan bahwa kami tidak bisa menulis seperti ini karena harus memperhitungkan kepentingan pemilik" (Wawancara dengan Kardono Setyorakhmadi, 21 Februari 2010). Namun, wartawan *Jawa Pos* lainnya, Ahmad Ainur Rahman, menggambarkan instruksi-instruksi dari manajer dan editor sebagai "intervensi lembut". Dia mengatakan: "Itu bisa terjadi dalam berbagai cara, tetapi kebanyakan mereka melindungi kepentingan teman-teman mereka dan mendorong kita untuk tidak menulis cerita buruk tentang mereka atau pengiklan" (Wawancara dengan Ahmad Ainur Rahman, 21 Februari 2010). Jika pengaturan ini dirusak oleh wartawan, berita dapat diperhalus oleh editor. Rahman mengatakan:

Tidak ada instruksi pasti atau manual. Kita tahu jika kita menulis sesuatu [yang tabu] editor akan tidak senang atau bahkan beberapa bagian berita tidak akan muncul di versi akhir. Kami mulai melakukan swasensor terhadap apapun yang kita tulis. Ini menjadi mekanisme alami. Anda dapat mulai mengetahui apa yang Anda bisa dan tidak bisa tulis sehingga Anda mulai swasensor. Kita hanya tahu (Wawancara dengan Ahmad Ainur Rahman, 21 Februari 2010).

Kardono menganggap itu adalah bagian dari praktek profesional seorang jurnalis untuk bekerja dalam pengaturan politik dan bisnis:

Saya tahu konstelasi politik dan mafia di Surabaya. Saya tahu orang-orang yang memiliki pengaruh kuat dan orang-orang yang teman dekat dengan bos saya dan siapa yang tidak. Saya harus tahu siapa yang merupakan teman dekat dari kepemimpinan *Jawa Pos*. Jika saya harus menulis cerita tentang teman dekat, saya akan memanggil editor, dan bertanya,

'Bagaimana kita harus menutupi hal ini?' Aku tahu untuk tidak melewati batas." (Kardono Setyorakhmadi, 21 Februari 2010).

Praktek memanggil editor sebelum memutuskan cerita merupakan konsekuensi yang jelas dari tekanan yang ditempatkan pada wartawan, dan Kardono adalah salah satu dari banyak wartawan yang mengatakan kepada saya bahwa mereka akan memanggil editor sebelum menulis sebuah cerita tentang seorang teman dari manajemen. Wartawan belajar bahwa mengkritik kepentingan pemilik berarti "melewati batas". Hal ini mengarah pada lingkungan di mana ruang redaksi ditekan untuk menghindari topik tabu. Selama Orde Baru, topik tabu adalah kepentingan bisnis keluarga Soeharto, korupsi pemerintah, dan kritik pada militer. Hari ini, topik yang tabu jelas mereka yang mengkritik pemilik bisnis atau kepentingan politik. Salah satu staf senior *The Jakarta Globe*, harian berbahasa Inggris milik James Riady, mengatakan bahwa masalah terbesar dalam pekerjaan mereka adalah kepemilikan: "Kami berhati-hati meliput Lippo. Belum ada kejadian dimana kita terang-terangan diberi tahu untuk tidak menjalankan sebuah berita penting, tapi kami merasakan tekanan untuk lebih halus jika memberitakan Lippo atau James Riady" (Wawancara dengan Anonim 6, 8 Maret 2010).

Muninggar Sri Saraswati adalah kepala reporter politik *Globe* sejak awal tahun 2008. Pada bulan Maret 2010, ia memutuskan untuk berhenti karena dia merasa dia tidak memiliki kemandirian yang cukup dari editor atau manajemen. Dia mengatakan: "Jika Anda menulis sesuatu yang melibatkan Lippo, Anda harus sangat berhati-hati. Ini bukan instruksi langsung dari editor Anda - kita hanya tahu bahwa kita tidak dapat melaporkan hal-hal tertentu. Mereka meminta kami untuk menutupi peristiwa-peristiwa tertentu dengan perusahaan, dan perintah menyaring turun dari atas" (Wawancara dengan Muninggar Sri Saraswati, 18 Maret 2010). Dengan demikian, praktek profesional untuk banyak wartawan *The Jakarta Globe* adalah untuk mengetahui topik yang mereka bisa tulis secara terbuka dan mana yang tidak bisa mereka liput karena tekanan dari manajemen.

Jika pesan belum dibuat jelas melalui panggilan telepon dan instruksi manajemen, editor surat kabar di Indonesia telah dikenal untuk mengubah isi berita. Sedangkan sensor langsung oleh editor memiliki efek langsung pada berita tertentu, konsekuensi yang lebih tahan lama adalah ketakutan internal yang disebabkan tindakan ini dalam ruang redaksi dengan mendorong jurnalis untuk secara teratur melakukan swasensor. Saraswati menyatakan bahwa "Semua berita yang sensitif atau politis ditangani langsung oleh Pemimpin Redaksi", dan bahwa ia telah melihat aspek-aspek kunci dari berita yang ditulisnya berubah setelah publikasi (Wawancara dengan Muninggar Sri Saraswati, 18 Maret 2010). Dia pernah diberitahu oleh seorang editor bahwa berita yang ia tulis terlalu kritis terhadap Presiden. Hasilnya, katanya, adalah kemunduran praktek jurnalistik profesional: "Setelah beberapa waktu, kami berhenti mengajukan pertanyaan sulit, dan kita berhenti mengeluh kepada manajemen atau editor karena ini telah menjadi bagian dari sistem kerja surat kabar" (Wawancara dengan Muninggar Sri Saraswati, 18 Maret 2010).

Demikian pula yang terjadi pada Janeman Latul, wartawan bisnis *Globe*, memutuskan untuk pindah ke *Reuters* pada bulan April 2010. Dia ingat menulis cerita tentang pertempuran kelompok Lippo dengan pesaing *supermarket*, Carrefour, di mana "kisah nyata tidak keluar" dan bagian tertentu dihapus editor.<sup>10</sup> Dia menyatakan bahwa: "Itu jelas dari pengalaman bahwa jika taipan raksasa memiliki perusahaan, mereka cenderung mengubah berita. Saya kemudian diberitahu bahwa kita mencetak [seluruh] berita, kita bisa mendapat masalah dari Lippo" (Wawancara dengan Janeman Latul, 18 Maret 2010).

Para editor yang diwawancarai untuk penelitian ini mengakui bahwa ada saat-saat ketika mereka mengejar kepentingan pemiliknya. Seperti dinyatakan sebelumnya, contoh yang jelas adalah selama kampanye Presiden Golkar 2008, seperti perusahaan media Surya Paloh dan Aburizal Bakrie yang berani berkampanye untuk pemilihan masing-masing pemilik (Lutfia dan Prameshwari, 2009). Lisa Luhur-Schad, Presiden Direktur *Media Indonesia*, mengatakan pembaca koran tidak terlalu khawatir tentang kepentingan tersembunyi ini: "[Pada] saat pemilu, Paloh tidak menghentikan kami untuk meliput (calon) yang lain, tapi dia menggunakan lebih banyak halaman dan ruang untuk dirinya sendiri. Kami masih meliput yang lain. Semua orang tahu *Media Indonesia* dimiliki oleh Surya Paloh" (Wawancara dengan Lisa Luhur-Schad, 1 Mei 2010). Pemimpin Redaksi *Media Indonesia*, Suar Hutabarat, sepakat bahwa korannya telah mendorong kepentingan Paloh dan memaafkan ini dengan alasan bahwa lanskap media di Indonesia sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi publikasi tidak memihak. Dia mengatakan:

"Semua orang tahu, suatu hari Surya ingin menjadi Presiden. Masyarakat memahami bahwa koran kami akan bersimpati terhadap dirinya. Setiap surat kabar memiliki preferensi untuk calon dan tidak ada media yang benar-benar independen dalam waktu pemilihan" (Wawancara dengan Suar Hutabarat, 1 Mei 2010).

Hutabarat mungkin benar, bahwa dengan meningkatnya hubungan antara kepemilikan media dengan politik dan bisnis, surat kabar lebih terbuka dalam mendukung kandidat Pemilu. Tapi wartawan *Media Indonesia* mengeluh tentang kurangnya keseimbangan dalam liputan di koran dan bahwa berita yang kredibel telah digantikan oleh liputan kampanye Surya (Hidayat *et al.*, 2009, hlm 127-28). Agus Sudibyo, Ketua Komisi Etika di Dewan Pers Indonesia, setuju, dengan mengatakan: "Masalahnya adalah struktur internal media. Siapa saja yang memiliki uang dapat menggunakan media. Misalnya, [selama] kompetisi untuk Golkar antara Bakrie dan Paloh [pada 2008], saya berbicara dengan banyak wartawan yang tidak senang karena terus-menerus harus menutupi bos mereka dalam berita" (Wawancara dengan Agus Sudibyo, 29 April 2010).

Instruksi konsisten dan teguran perlu diperhatikan jika wartawan ingin terus melaporkan politik dan isu

10 Untuk membaca apa yang dipublikasikan lihat Janeman Latul, 'Pluit Village Owner says Carrefour's Lease Invalid', *The Jakarta Globe*, 13 Agustus 2009. Tersedia di <http://www.thejakartaglobe.com/business/pluit-village-owner-says-carrefour-lease-invalid/323938>, diakses 1 Agustus 2011.

terkini. Jurnalis muda melihat bahwa rekan-rekan yang tidak mengikuti perintah dari manajemen atau editor dapat dengan cepat diganti. Saya berbicara dengan seorang wartawan yang, sementara pelaporan untuk meja politik, ketika meliput untuk bidang politik, meliput seorang teman pemilik (media) dengan tidak baik. Dia tiba-tiba menemukan dirinya meliput olahraga lokal. Baru-baru ini, wartawan Wimar Witoelar mengeluh bahwa ia telah dipecat dari sebuah *talk show* MetroTV karena ia secara tidak langsung menghina Surya Paloh (Oktofani, 2011). Seperti yang dikatakan salah satu wartawan: "Kadang-kadang saya merasa seperti saya sendiri menyensor laporan saya. Aku punya garis merah. Karena saya tidak menulis segala sesuatu, saya masih memiliki pekerjaan" (Wawancara dengan Anonim 7, 13 April 2010).

Wartawan lain mengatakan kepada saya:

"Kami menulis dengan lebih sensitif dan ini sulit untuk dijelaskan. Kami memberikan cubitan bukan tamparan. Anda tidak tahu betapa kuatnya orang-orang ini. Mereka dapat menurunkan Menteri, Polisi, Gubernur. . . Ini tidak akan sulit bagi mereka untuk mengatur bagi saya untuk dipecat. Itu adalah ketakutan terbesar saya, bahwa suatu hari saya akan dipecat" (Wawancara dengan Anonim 8, 15 Februari 2010).

Contoh-contoh di atas telah menguraikan teknik yang digunakan untuk membatasi otonomi jurnalis di Indonesia. Ini termasuk panggilan telepon dan teguran dari pejabat dan editor, penetapan agenda oleh manajemen dan pemimpin redaksi, dan penciptaan lingkungan di dalam ruang redaksi dimana wartawan didorong untuk waspada terhadap topik tabu, dan mempraktikkan swasensor selagi mereka menulis. Dalam kasus-kasus yang dibahas ini jelaslah bahwa seringkali berita tidak dibentuk oleh kepentingan umum, atau media sebagai *watchdog* - nilai-nilai yang dinilai krusial oleh jurnalis surat kabar kontemporer Indonesia dalam praktek profesional mereka – tetapi lebih pada tuntutan dari atasan yang berhati-hati untuk tidak mempublikasikan artikel yang dianggap sensitif terhadap kepentingan pemilik.

## Kesimpulan

Menurut wartawan yang bekerja untuk surat kabar yang disurvei dalam artikel ini, pembelian baru atau pembentukan surat kabar oleh anggota elit politik dan bisnis telah menyebabkan publikasi mereka digunakan untuk mempromosikan kepentingan pemiliknya. Sementara pemilik yang dibahas dalam artikel ini memiliki berbagai tingkat kekuasaan dan ambisi politik (misalnya, Aburizal Bakrie adalah sosok yang jauh lebih kuat dalam politik Indonesia dan bisnis daripada Dahlan Iskan), wartawan yang bekerja untuk surat kabar ini berbicara dengan jelas tentang topik tabu dan swasensor. Pada akhirnya, penebitan yang diperiksa dalam artikel ini cenderung untuk membatasi liputan pada bisnis atau kepentingan politik pemiliknya. Yang terburuk, mereka bisa menjadi "koran kecil untuk kelompok tertentu" (Haryanto, 2011, h. 114).

Meskipun koran-koran ini baru didirikan (atau didirikan ulang) di era kebebasan pers di Indonesia, wartawan yang bekerja untuk penerbitan ini terus berperang untuk hak meliput secara bebas, dan

editor harus berhati-hati dalam mempublikasikan berita yang mungkin menentang atau membuat marah elite berkuasa yang memiliki koneksi dengan penerbitan tersebut. Seperti yang ditulis Rachma Ida: "ruang demokratisasi praktek media berkurang ketika saluran untuk wacana publik yang diperlukan untuk reformasi media dikendalikan oleh mereka yang menganggap praktik seperti itu akan menjadi ancaman" (Rachma Ida, 2011, hal 16). Robison dan Hadiz berpendapat bahwa transisi dari pemerintahan otoriter hanya dilihat sebagai "munculnya kembali aliansi oligarkis baru yang dengan mudah dakomodasi dalam bentuk demokrasi dengan karakter politik uang dan kepantasan ekstra-legal atas kekuasaan negara" (Robison dan Hadiz, 2004, hal 224). Yuli Ismartono, Pemimpin Redaksi *Tempo* (English) mengatakan dengan lebih blak-blakan dalam sebuah wawancara dengan penulis: "Mentalitas Orde Baru mungkin adalah kekuasaan, dan itu dipaksakan. Sekarang, uang yang menjadi kekuasaan" (Wawancara dengan Yuli Ismartono, 30 April 2010). Meskipun Departemen Penerangan ditutup pada tahun 1999, praktek swasensor - sebuah metode kunci dalam membatasi kritik pada elit penguasa di bawah rezim Orde Baru - masih jelas terlihat dalam jurnalisme Indonesia saat ini. Dengan perkataan mereka sendiri, wartawan koran Indonesia telah menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan dalam surat kabar baru yang dimiliki oleh mogul media.

Tentu saja, isu-isu kepemilikan pers tidak terbatas pada Indonesia, atau negara-negara yang baru berdemokrasi, tapi artikel ini memberikan bobot lebih lanjut untuk argumen Robison dan Hadiz, yang menyatakan bahwa situasi kekuasaan oligarki di Indonesia pasca-Soeharto bukan hanya soal "rasa sakit yang terus tumbuh" dalam masa awal demokrasi liberal (Robison dan Hadiz, 2004, hal. 256). Masalah yang diciptakan oleh kepemilikan bukanlah tahap yang tak terelakkan dalam reformasi dalam kebebasan pers di Nusantara. Evolusi mekanisme kekuasaan di Indonesia belum bergerak dengan mudah dari rezim otoriter ke pers yang dapat menulis dengan bebas pada semua topik.

Kemampuan untuk mencegah aliran informasi yang bebas di publikasi media kurang efektif saat ini dibandingkan selama era Soeharto. Dari tahun 1965, tentakel Orde Baru mencapai semua koran, dan praktek swasensor yang ketat ditegakkan melalui topik tabu yang dipahami seluruh industri, seperti militer atau kepentingan bisnis keluarga presiden. Robison dan Hadiz berpendapat bahwa "rezim baru oligarki akan menciptakan ketegangan dan kontradiksi, dan perebutan kekuasaan seperti itu di oligarki kadang-kadang akan lebih 'terbuka' di ranah publik" (Robison dan Hadiz, 2004, hal. 258). Sebuah contoh yang baik dari ini adalah pertempuran untuk kepemimpinan Golkar antara rival mogul media Aburizal Bakrie dan Surya Paloh yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, di Indonesia baru yang mengalami demokrasi, sedangkan masing-masing penerbitan mempertahankan "topik tabu" nya sendiri, kisah-kisah ini masih lebih mudah diakses di ranah publik daripada topik tabu di masa Orde Baru. Misalnya, wartawan *Surabaya Post* yang mengeluh karena tidak bisa menulis secara terbuka tentang semburan lumpur di Sidoarjo, tapi wartawan Grup

*Jawa Pos* menulis simpati mengenai korban lumpur dan mengkritik keterlibatan Lapindo dalam bencana secara terbuka dan konsisten. Meski demikian, seperti yang Robison dan Hadiz simpulkan: "Politik Indonesia kontemporer menampilkan beberapa kontinuitas yang luar biasa dengan era Soeharto, terutama dalam hal persaingan kepentingan dan dorongan merekonstruksi kerangka politik" (Robison dan Hadiz, 2004, hal 224).

Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa ada kesinambungan swasensor dalam praktek profesional wartawan Indonesia dan bahwa ini merupakan masalah penting yang layak didokumentasikan. Saat ini, kebebasan pers di Indonesia terus beroperasi sedemikian rupa sehingga banyak wartawan harus melakukan swasensor pada artikel mereka untuk menunjukkan bahwa mereka menyadari siapa yang berkuasa.

Seperti disebutkan di atas, wartawan Indonesia selama Orde Baru belajar untuk menggunakan "pesan tersembunyi" dalam liputan mereka karena mereka tidak mampu menulis secara terbuka pada topik-topik tertentu. Mereka yang membeli surat kabar di Indonesia belajar "membaca di antara garis". Sampai sejauh mana praktek ini masih ada adalah masalah yang layak dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan respon terhadap situasi kepemilikan surat kabar audiens saat ini. Bagi banyak orang Indonesia, pers selalu menjadi organ bagi mereka yang berkuasa. Penelitian lebih lanjut dapat meneliti aspek sosiologis dari media, termasuk harapan pembaca. Apakah publik Indonesia juga memiliki pendapat yang sama dengan banyak wartawan Indonesia bahwa pers harus bebas dan tidak memihak? Sejauh mana mereka memahami kendala ini dan menyaringnya? Pembaca mungkin menyadari bahwa Surya Paloh memiliki *Media Indonesia*, namun intrik yang lebih halus, seperti cara di mana

eksekuti Lapindo membentuk berita dalam *Surabaya Post*, mungkin kurang disadari.

Hal ini penting untuk dinyatakan bahwa wartawan jarang ditegur secara pribadi oleh pemilik yang sebenarnya dari surat kabar mereka. Dalam wawancara saya, hampir semua wartawan menyatakan bahwa mereka belum pernah bertemu dengan pemilik, dan tentu saja tidak menerima dokumen atau kebijakan resmi mengenai peliputan kepentingan bisnis atau politik dari pemilik. Setelah wartawan ditegur atau dipindahkan ke meja lain karena melaporkan "topik tabu", nilai-nilai yang diinternalisasi di ruang redaksi dengan cepat menjadi praktek swasensor yang dipahami bersama. Artikel menjadi condong pada pemilik, pertanyaan kritis tidak diajukan, dan topik sensitif dihindari. Pemilik media yang bertujuan pada pasar dan konglomerat telah mengurangi independensi banyak penerbitan, dan para wartawan yang berjuang untuk mendapatkan kembali otonomi mereka menemukan tugas sulit. Seperti yang ditulis dengan tepat oleh Janet Steele:

"Dalam beberapa hal, lebih mudah bagi wartawan untuk menentang diktator daripada untuk melawan kekuatan pasar" (Steele, 2011, h. 99). Meningkatnya jumlah surat kabar yang dibeli atau didirikan oleh pengusaha dan politisi di Indonesia, berhubungan dengan kurangnya tindakan pencegahan terhadap meningkatnya kartelisasi kepemilikan media (Harymurti, 2010, h. 17), dapat membawa kita untuk berspekulasi: Siapa, selain mereka yang memiliki kepentingan pribadi, yang akan mampu untuk memiliki koran di masa depan? Dan apa pembatasan yang akan terus dihadapi wartawan surat kabar dalam praktek profesional mereka, karena mereka berangkat dengan tujuan untuk meliput secara akurat dan mencakup berbagai isu untuk orang Indonesia yang mengandalkan media cetak untuk berita terpercaya dan seimbang?

## Daftar Pustaka

- Barton, G. (2002). *Abdurrahman wahid: muslim, democrat, Indonesian president*. Sydney: UNSW Press.
- Committee to Protect Journalists (1995). *In the censor's shadow: journalism in Suharto's Indonesia*. New York: Committee to Protect Journalists.
- Darudoyo, H. (2009). Editorial dependence. *Inside Indonesia*, 95. Diakses tanggal 14 Februari 2010 dari <http://www.insideindonesia.org/edition-95/editorial-dependence>
- Dhakidae, D. (1991). *The state, the rise of capital and the fall of political journalism: political economy of the Indonesian news industry*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Eun Suk Sa (2009). *Factors influencing freedom of the press in South Korea*. *Asian Social Science*, 5(3), h.1-24.
- Fitzpatrick, S. (2006) Suharto's legacy rules and divides. *The Australian*, Diakses tanggal 19 Maret 2010 dari <http://www.theaustralian.com.au/news/world/suhartos-legacy-rules-and-divides/story-e6frg6so-1111>
- Forbes Magazine (2011). Indonesia's 40 richest wealth list. *Forbes Magazine*, 2(12), Desember.
- Freedom House (2011). Report on press freedom. Diakses tanggal 26 Maret 2011 dari <http://freedomhouse.org/template.cfm?page%4668>, dan dari <http://freedomhouse.org/images/File/fop/2011/FOTP2011GlobalRegionalTables.pdf>
- Hanitzsch, T. (2007). Mapping journalism culture: a theoretical taxonomy and case studies from Indonesia. *Asian Journal of Communication*, 16(2), h.169-86.
- Haryanto, I. (2011). "Media ownership and its implications for journalists and journalism in Indonesia". Dalam D. Hill dan K. Sen (Eds.), *Politics and the media in twenty-first century Indonesia: decade of democracy* (h.104-118). New York: Routledge.
- Harymurti, B. (2010). Under the rule of press law. *Walkley Magazine*, 15 April.
- Heryanto, A. (2003). Public intellectuals, media and democratization: Cultural politics of the middle classes in Indonesia. Dalam A. Heryanto dan S. Mandal (Eds.), *Challenging authoritarianism in Southeast Asia* (h.24-60). New York and London: RoutledgeCurzon.
- Hidayat, D.N., E. Gazali & V. Menayang (2009). Political communication in Indonesia: Media performance in three eras. Dalam L. Willnat dan A. Aw (Eds.), *Political communication in Asia* (h.112-34). New York: Routledge.
- Hill, D.T. (1994). The press in New Order Indonesia (*Asia Papers* No. 4). Perth: University of Western Australia Press.
- Hill, D.T. & K. Sen (2007). *The internet in Indonesia's new democracy*. London; New York: Routledge.
- Hill, D.T. (2011). On the border: Local media in the land of Papua. Dalam D. Hill dan K. Sen (Eds.), *Politics and the media in twenty-first century Indonesia: Decade of democracy*, h.26-48. London; New York: Routledge.
- Jawa Pos (2010). Jawa Pos: Newspaper for Everyone. Jawa Pos Group.

- Kakiaiatu, T. (2007). Media in Indonesia: forum for political change and critical assessment. *Asia Pacific Viewpoint*, 48(1), h. 60–71.
- Kitley, P. (2008a). Civil society and the media in Indonesia. Dalam A. Azra dan W. Hudson (Eds), *Islam beyond conflict: Indonesian Islam and Western political theory*. Burlington: Ashgate.
- Kitley, P. (2008b). Winning an information war: An Indonesian case study, Dalam E.A. Thompson dan P.R.R.White (Eds.), *Communicating conflict: Multilingual case studies of the news media*, London: Continuum.
- Lee Kuan Yew (1992). Discipline versus democracy. *Far Eastern Economic Review*, 10 Desember, h.29.
- Lee, O.H. (1971). Indonesian government and the press during guided democracy (*Hull Monographs on Southeast Asia* No. 4). Hull, Inggris: University of Hull.
- Luan, N.M. & L. Hoon (2008). Journalism education in Malaysia. *Media Asia*, 35(2), h.84-101.
- Lutfia, I. and P. Prameshwari (2009). Golkar moguls' TV clash shows media bias: Critics. *The Jakarta Globe*, 1 Oktober. Diakses tanggal 25 Maret 2011 dari <http://www.thejakartaglobe.com/indonesia/golkar-moguls-tv-clash-shows-media-bias-critics/333031>
- Mahathir, M. (1985). A prescription for a socially responsible press. *Media Asia*, 12(4), h. 212-15.
- McMichael, H. (2009). The Lapindo mudflow disaster: Environmental infrastructure and economic impact. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45(1), h. 73-83.
- Mellish, M. (2006). Why it's all quiet on the West Papua Front. *Walkely Magazine*, 44.
- The New York Times* (2001). Businessman to pay record campaign fine, 20 Maret. Diakses tanggal 21 April 2011 dari <http://www.nytimes.com/2001/03/20/us/national-news-briefs-businessman-to-pay-record-campaign-fine.html?ref%4jamestriady>, accessed 21 April 2011.
- Oktofani, E. (2011). Show's end not down to Tweet. *The Jakarta Globe*, 6 April. Diakses tanggal 21 Juni 2011 dari <http://www.thejakartaglobe.com/home/shows-end-not-down-to-tweet-metro-tv/433942>, accessed 21 June 2011.
- Prasad, K. (2008). The false promise of media liberalisation in India. Dalam C. George (Ed.), *Free markets, free media? Reflections on the political economy of the press in Asia*. Nanyang: Nanyang University Press
- Rachma Ida (2011). Reorganisation of media power in post-authoritarian Indonesia: Ownership, power and influence of local media entrepreneurs. Dalam D. Hill dan K. Sen (Eds), *Politics and the media in twenty-first century Indonesia: Decade of democracy* (h. 14-25). New York and London: Routledge.
- Rahman, A.A. Wawancara pribadi, 21 Februari 2010, Surabaya.
- Reporters Without Borders (2011). World Press Freedom Index 2011–2012. Diakses pada tanggal 12 Februari 2012 dari <http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html>
- Robison, R. & V. Hadiz (2004). *Re-organising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. London and New York: RoutledgeCurzon.
- Rodgers, P. (1982). *The domestic and foreign press in Indonesia*. Brisbane: Centre for the Study of Australian-Asian Relations, Griffith University.
- Romano, A. (1999). Developmental journalism: State versus practitioner perspectives in Indonesia. *Media Asia*, 26(4), h.183–91.
- Romano, A. (2003). *Politics and the press in Indonesia: Understanding an evolving political culture*. London; New York: RoutledgeCurzon.
- Romano, A. (2005). Asian journalism: News, development and the tides of liberalization and technology. Dalam A. Romano dan M. Bromley (Eds), *Journalism and democracy in Asia* (h. 1-14). London; New York: Routledge.
- Schiller, J., A. Lucas, & P. Sulistiyanto (2008). Learning from the East Java mudflow: Disaster politics in Indonesia. *Indonesia*, 85, April, h.51–78.
- Schwartz, A. (1994). *A nation in waiting; Indonesia in the 1990s*. Sydney: Allen and Unwin.
- Sen, K. (2011) Introduction: Re-forming media in Indonesia's transition to democracy. Dalam D. Hill dan K. Sen (Eds), *Politics and the media in twenty-first century Indonesia: Decade of democracy* (h.1-12). London; New York: Routledge.
- Seneviratne, K. (2008). Journalism by whom, for whom? Dalam C. George (Ed.), *Free markets, free media? Reflections on the political economy of the press in Asia*. Nanyang: Nanyang University Press.
- Steele, J. (2011). Indonesian journalism post-Suharto: Changing ideals and professional practices. Dalam D. Hill dan K. Sen (Eds), *Politics and the media in twenty-first century Indonesia: Decade of democracy* (h.85–103). New York: Routledge.
- Steele, J. (2006). *Wars within: The story of Tempo, an independent magazine in Suharto's Indonesia*. Jakarta: Equinox.
- Suharto (1989). The role of the press in national development. Dalam Achal Mehra (Ed.), *Press systems in ASEAN states*. Singapura: AMCRIC.
- Tapsell, R. (2010) Stopping the flow. Inside Indonesia, 101, Diakses pada tanggal 20 Februari 2011 dari <http://www.insideindonesia.org/weekly-articles-101-jul-sep-2010/stopping-the-flow-10071903>
- United Nations Development Program (1998) Human development report, 1998. Paris: UNDP.